

## BAB V

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 5.1. Kesimpulan

Bagian ini merupakan kesimpulan dari penelitian skripsi yang berjudul *Pemberontakan Dewan Rakyat di Banten Pada Tahun (1945)*. Simpulan dalam bagian ini merujuk pada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan peneliti yang telah di rumuskan pada bab IV. Setelah melakukan pengkajian terhadap permasalahan yang dibahas, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, Kondisi sosial politik Karesidenan Banten pasca kemerdekaan sangat mempengaruhi peristiwa-peristiwa revolusi yang terjadi di daerah tersebut. Salah satunya yaitu peristiwa pemberontakan Dewan Rakyat yang diteliti oleh penulis. Banten pada awal kemerdekaan merupakan daerah Karesidenan yang terdiri dari tiga kabupaten yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Masyarakat Banten merupakan masyarakat yang religus dan memegang teguh agama Islam, terlihat dari status kiai dan haji yang sangat dihormati oleh masyarakat. Mereka memegang peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat, mereka mengajar ngaji dan menjadi guru agama panutan rakyat. Status kiai dan haji dianggap sebagai *symbol of social prestige* (martabat sosial). Namun status kiai dianggap lebih tinggi dari sekedar haji. Selain Kiai dan Haji, terdapat pula golongan lain yang berpengaruh di dalam tatanan sosial Karesidenan Banten. Mereka adalah golongan Jawara, yang mengandalkan kemampuannya di dalam ilmu bela diri. Mereka menjadi kelompok yang ditakuti oleh masyarakat di Banten.

Setelah diprolamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Banten menjadi Karesidenan yang ikut membangun pemerintahannya sendiri sebagai Karesidenan yang berdaulat, sesuai dengan perintah KNIP pusat. K.H. Achmad Chatib diangkat menjadi Residen mengingat Chatib merupakan orang yang paling tepat untuk memimpin Karesidenan, disamping Chatib didesak oleh para pemuda, ia pun merupakan salah satu Kiai yang disegani di Karesidenan Banten pada saat itu. K.H Achmad Chatib pun

mengambil langkah untuk menyusun pemerintahan agar birokrasi di daerah Banten dapat terus berjalan. Residen mengambil langkah tersebut dengan mengeluarkan pejabat pemerintahan kolonial Jepang dan digantikan oleh wakilnya yang kebanyakan orang-orang dari Pasundan.

Kedua, setelah pembentukan struktur pemerintahan yang terdiri dari bekas-bekas pejabat kolonial. Terjadi sebuah protes dari seorang tokoh KNID yang tidak suka dengan pengangkatan pegawai pemerintahan dari bekas pejabat kolonial, menurutnya pegawai pemerintahan bekas kolonial hanya akan menjadi kaki tangan pihak imperialis, dan membentuk kolonialis baru yang nantinya akan memiihak pada sekutu ketika sekutu datang. Namun K.H. Achmad Chatib memiliki pertimbangan lain, menurut pertimbangannya di dalam keadaan transisi seperti saat itu, hanya para pejabat lamalah yang lebih mengetahui administrasi pemerintahan di daerahnya. Seorang tokoh KNID kabupaten Serang bernama Ce Mamat menjadi pelopor dalam memprotes penggantian aparatur pemerintah kolonial tersebut. Permintaan pun dibuat untuk menggantikan mantan pejabat kolonial tersebut, namun Chatib tidak menanggapi. Ce Mamat kemudian mengambil langkah untuk merekrut anggota guna menghimpun kekuatan sebagai usaha untuk merebut kekuasaan dari pemerintahan saat itu.

Ce Mamat merekrut sekelompok orang untuk melancarkan aksinya sebagai bentuk dukungan untuk membersihkan pemerintahan dari warisan kolonial yang terdiri dari orang-orang Priangan. Ce Mamat menyebut perkumpulan ini dengan nama Dewan Perwakilan Rakyat, anggotanya kebanyakan berasal dari kaum jawara. Nama Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya lebih dikenal sebagai Dewan Rakyat disebut juga Dewan Ce Mamat yang terdiri dari Laskar-laskar Rakyat, termasuk Laskar Gulkut, yang merupakan Laskar dari kaum Jawara yang kebanyakan berasal dari Ciomas. Kaum jawara memang menjadi kelompok terdepan yang mendukung gerakan Dewan Rakyat karena mereka merupakan kelompok yang paling tidak menyukai Pamong Praja yang berasal dari Priangan tersebut.

Ketidaksukaan masyarakat Banten terhadap pegawai pemerintahan yang berasal dari Priangan itulah yang menjadi alasan kuat gerakan Dewan Rakyat

mendapatkan dukungan dari rakyat. Orang-orang yang memiliki persaan dendam dan sakit hati terhadap orang-orang Priangan dan bergabung bersama Dewan Rakyat dan menuntut pengangkatan kaum ulama yang mengisi posisi pemerintahan. Pamong Praja tersebut dibenci oleh masyarakat penduduk karena mereka dianggap kolaborator kolonial, sehingga kesetiaan utamanya tetap pada para Ulama. Banten pada masa ini tetap menjadi sebuah daerah yang konservatif. Sehingga aksi dewan mendapatkan dukungan penuh dari para jawara yang sangat membenci aparat pemerintah kolonial yang sudah turun temurun, maka para jawara tersebut menjadi sekutu alami Dewan.

Aksi pemberontakan yang dilakukan oleh Dewan Rakyat terdiri dari aksi-aksi yang cukup keras. Aksi pertamanya dilakukan dengan cara merebut kekuasaan Residen dari K.H.Achmad Chatib, Dewan Rakyat menjadikan Residen tidak berdaya, dan menjadikan Dewan Rakyat sebagai pemimpin utama pemerintahan. Residen akhirnya menyerah dan menyerahkan kekuasaan kepada Dewan Rakyat mengingat situasi yang sangat mendesak. Sebetulnya Rasiden menuruti keinginan Dewan hanya sekedar untuk menghindarkan pertumpahan darah yang tidak perlu. Oleh sebab itu untuk mencegah terjadinya pertumpahan darah itu, Rasiden terpaksa menyerah kepada Ce Mamat sebagai pemimpin Dewan Rakyat. Aksi Dewan Rakyat selanjutnya dipenuhi oleh kegiatan culik-menculik, pegawai-pegawai pemerintahan yang berasal dari Priangan disandra dan beberapa ada yang dibunuh.

Ketiga, penculikan dan pembunuhan yang terjadi terhadap bekas bupati Lebak R. Hadiwinangun membuat Residen K.H. Achmad Chatib geram dan menginstruksikan untuk membubarkan Dewan Rakyat dan menyerang ke markasnya. TKR berhasil menumpas gerakan Dewan Rakyat dengan sebuah pertempuran yang alot. Dengan pasukan-pasukan Dewan Rakyat yang tidak terlatih dan lemah persenjataannya, mereka dapat dengan cepat dikalahkan. Namun Ce Mamat sebagai pemimpin gerakan tidak tertangkap, ia berhasil meloloskan diri ke Bogor. Dengan meloloskan dirinya, Ce Mamat sebagai pimpinan tertinggi aksi pemberontakan Dewan Rakyat di Karesidenan Banten, Residen K.H Achmad Chatib membubarkan Dewan Rakyat dan membenahi pemerintahanya seperti semula.

**Agus Shofariyanto, 2017**

*PEMBERONTAKAN DEWAN RAKYAT DI BANTEN (1945)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Walaupun keadaan di daerah itu dapat dikatakan aman dan kehidupan sosial kembali seperti semula, namun pada hakekatnya kerusuhan-kerusuhan masih sering terjadi hal itu terutama disebabkan oleh trauma pasca imprealis kolonialis yang masih belum lenyap di kalangan masarakat Karesidenan Banten. Hal ini juga dipicu oleh pegawai pemerintah yang berasal dari Priangan yang kembali ditempatkan oleh Achmad Chatib untuk mengurus pemerintahan karena menurut Achmad Chatib merekalah yang dianggap cakap dalam mengatur pemerintahan pada saat itu.

Dengan ditumpasnya pemberontakan Dewan Rakyat pada bulan Januari 1946, radikalisme di daerah ini mengalami kemunduran. Secara politik dan organisasi, Dewan Rakyat tidak mampu membuat struktur dan program yang sanggup bertahan terhadap oposisi lokal maupun nasional. Penghapusan Dewan Rakyat berarti bahwa revolusi sosial sudah berakhir. Regionalisme dan anti-kolonialisme menjadi unsur yang lebih penting, baik dalam perjuangan revolusioner maupun dalam ketegangan antara pemerintah Banten dan Pemerintahan Pusat Republik Indonesia di Yogyakarta.

## **5.2. Rekomendasi**

Penelitian Skripsi ini diharapkan dapat memberikan implikasi dalam bidang kajian sejarah revolusi Indonesia khususnya peristiwa-peristiwa yang terjadi di daerah-daerah seperti Banten. Selain itu sebagai acuan bagi para akademisi yang ingin melakukan penelitian-penelitian berikutnya dengan tema yang serupa. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti memberikan rekomendasi untuk beberapa pihak terkait, rekomendasi tersebut diantaranya:

1. Untuk lembaga Universitas Pendidikan Indonesia, tulisan ini dapat dijadikan sumber bacaan untuk menambah pengetahuan mengenai Sejarah Revolusi Indonesia. Untuk Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, dapat dijadikan pembelajaran bagi mahasiswa sebagai calon pendidik Ilmu Pengetahuan Sosial. Untuk Departemen Pendidikan Sejarah, penelitian ini dapat memperkaya penulisan dan sumber bacaan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa revolusi Indonesia, serta dapat mengambil nilai-nilai yang terkandung pada peristiwa tersebut

2. Untuk lingkungan sekolah, penelitian ini dapat di jadikan pengayaan materi pada masa revolusi dan memberikan fakta baru mengenai sejarah revolusi di Indonesia khususnya di Banten, sehingga siswa-siswi di daerah asal peneliti yaitu Serang dapat mengetahui sejarah atau peristiwa yang pernah terjadi disekitarnya, sehingga menimbulkan jiwa nasionalisme dan patriotisme dan tidak melupakan sejarah bangsanya sendiri.
3. Untuk para pembaca, khususnya yang tertarik pada keilmuan sejarah, hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan khususnya mengenai sejarah revolusi Indonesia
4. Bagi seluruh masyarakat, peristiwa pemberontakan Dewan Rakyat hendaknya dapat memberikan nilai-nilai dan hikmahnya. Karena sejatinya setiap peristiwa yang terjadi hari ini adalah apa yang disebabkan oleh peristiwa di masa lampau. Seperti pemberontakan Dewan Rakyat terhadap pemerintah, hal tersebut dipicu oleh dendam di masa lampau terhadap orang-orang dari Priangan, sehingga terjadilah pemberontakan yang tidak dapat dihindarkan.
5. Untuk peneliti selanjutnya, penulis melihat bahwa kajian mengenai Pemberontakan Dewan Rakyat di Universitas Pendidikan Indonesia relatif masih sedikit. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, penulis hendak merekomendasikan agar di lakukan penelitian terhadap tokoh yang terlibat dalam Pemberontakan Dewan Rakyat seperti, TB. Achmad Chatib sebagai Residen pada saat itu dan K.H Syam'un sebagai ketua TKR Banten.